

CHINESE AND PHILANTHROPY: THE ROLE OF THE CHINESE COMMUNITY IN HUMANITARIAN CHARITABLE INSTITUTIONS IN SEMARANG 1920-1950

Tionghoa dan Filantropi: Peran Komunitas Tionghoa Dalam Lembaga Amal Kemanusiaan di Semarang 1920-1950

Muhammad Yanuar Rizki ^{1a(*)} Mukhamad Shokheh ^{2b}

¹²Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang

^ayanuarrizki13@students.unnes.ac.id

^bshokheh@mail.unnes.ac.id

(*) Corresponding Author

yanuarrizki13@students.unnes.ac.id

How to Cite: Muhammad Yanuar Rizki. (2025). Tionghoa dan Filantropi: Peran Komunitas Tionghoa Dalam Lembaga Amal Kemanusiaan di Semarang 1920-1950 doi: 10.36526/js.v3i2.5459

Received : 15-05-2025

Revised : 24-06-2025

Accepted: 25-06-2025

Keywords:

Chinese,
Charity,
Philanthropy

Abstract

This research aims to explain the role of the Chinese community in humanitarian charities in Semarang from the 1920s to the 1950s in the context of colonial segregation, war, and early Indonesian independence. Using historical research methods including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, the research analyzes archival documents, newspapers, and secondary literature to understand the evolution of humanitarian organizations founded by Chinese. Drawing on philanthropy theory and social capital theory, the study highlights how institutions such as Boen Hian Tong, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), Polikliniek Tionghoa, and St. Mary's Hall adapted and transformed through three major regimes: Dutch colonial rule, Japanese occupation, and the early Republic. These organizations not only served immediate communal needs but also laid the foundation for inclusive social welfare through education, health care, and mutual aid. A key finding is the strategic shift from ethnically exclusive charities to more open and cooperative institutions that were able to respond to changing socio-political pressures. The novelty of this research lies in its exclusive focus on the philanthropic ecosystem of the Chinese community in Semarang, its integrated analysis of cross-sectoral institutions, and the application of a dual theoretical framework to uncover community resilience and agency.

PENDAHULUAN

Komunitas Tionghoa di Indonesia memiliki sejarah panjang yang kompleks, dengan Semarang sebagai salah satu kota pelabuhan utama yang menjadi pusat pemukiman mereka sejak abad ke-15 (Utama & Lusianto, 2019). Interaksi awal dengan masyarakat lokal dan kolonial membentuk struktur sosial-budaya yang khas, termasuk dalam hal filantropi. Kegiatan kedermawanan dalam komunitas ini bukan sekadar ekspresi spontan dalam menghadapi krisis, melainkan merupakan bagian integral dari nilai-nilai Konfusianisme yang mengedepankan Ren (cinta kasih), Yi (keadilan), dan Xin (integritas). Dengan demikian, filantropi Tionghoa muncul sebagai wujud tanggung jawab kolektif dan mekanisme sosial dalam menghadapi pembatasan struktural dari pemerintah kolonial (Hartati, 2012).

Selama masa kolonial Belanda, kebijakan-kebijakan seperti *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* diterapkan untuk mengendalikan pergerakan dan distribusi spasial penduduk Tionghoa. Langkah-langkah ini mendorong iklim eksklusif dan pembatasan, yang secara efektif mengisolasi komunitas Tionghoa dari kehidupan perkotaan yang lebih luas. Ironisnya, diskriminasi kelembagaan tersebut juga memicu munculnya solidaritas internal yang kuat dan pengembangan organisasi swadaya

(Zakariya, 2023). Dengan tidak adanya kesejahteraan yang disponsori negara, para pemimpin dan anggota masyarakat Tionghoa memobilisasi modal sosial dan finansial untuk mendirikan lembaga pendidikan, medis, dan amal yang melayani rakyat mereka sendiri dan, semakin banyak, masyarakat luas.

Periode antara tahun 1920 dan 1950 ditandai oleh pergolakan besar di Indonesia. Periode ini menyaksikan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda, pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Setiap fase menimbulkan tantangan tersendiri bagi masyarakat sipil, khususnya bagi kelompok etnis minoritas yang sering terjebak di antara agenda nasionalis yang bersaing. Dalam konteks ini, komunitas Tionghoa di Semarang tidak hanya melestarikan tradisi filantropisnya tetapi juga mengadaptasinya sebagai respons terhadap tekanan sosial-politik yang berkembang. Lembaga-lembaga seperti Boen Hian Tong, Tiong Hoa Hwee Koan, Poliklinik Tionghoa, dan St. Mary's Hall mengubah fungsi, struktur, dan strategi penjangkauan mereka agar tetap relevan dan efektif.

Kajian sebelumnya seperti Hartono dan Wiyono (1985) dalam *Sejarah Sosial Kota Semarang*, banyak membahas struktur sosial dan kehidupan ekonomi, tetapi belum menggali secara spesifik lembaga amal Tionghoa. Demikian pula, Liem Thian Joe dalam *Riwayat Semarang* (2004) menekankan aspek elite Tionghoa dan peran Kong Koan, tanpa menjelaskan ekosistem filantropi secara menyeluruh. Penelitian ini meneliti bagaimana organisasi-organisasi kemanusiaan yang dipimpin oleh orang Tionghoa di Semarang menavigasi lanskap politik yang berubah selama tiga dekade. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti mekanisme yang digunakan komunitas-komunitas terpinggirkan untuk membangun dan mempertahankan lembaga-lembaga kesejahteraan dalam menghadapi eksklusi struktural. Kesenjangan ini sangat signifikan mengingat bahwa inisiatif-inisiatif kesejahteraan sosial sering kali berfungsi sebagai ruang-ruang penting untuk negosiasi budaya dan pelestarian identitas bagi komunitas-komunitas minoritas.

Secara teoritis, penelitian ini mengambil dari dua kerangka kerja yang saling melengkapi: teori filantropi dan teori modal sosial. Teori filantropi membantu mengonseptualisasikan dimensi-dimensi sukarela dan strategis dari pemberian di luar tindakan donasi langsung, menuju dukungan komunitas yang sistemik. Teori ini menekankan kesengajaan di balik penciptaan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengangkat seluruh populasi, terutama ketika aparaturnya gagal melakukannya. Sementara itu, teori modal sosial menawarkan wawasan tentang bagaimana kepercayaan, norma, dan jaringan dalam suatu komunitas dapat menghasilkan sumber daya yang memfasilitasi tindakan kooperatif dan kesejahteraan kolektif. Dalam kasus komunitas Tionghoa di Semarang, jaringan internal yang padat yang mencakup ikatan kekerabatan, afiliasi keagamaan, dan inisiatif pendidikan, membentuk landasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan lembaga kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dengan mensintesis kedua kerangka kerja ini, penelitian ini menyajikan interpretasi yang bernuansa tentang bagaimana komunitas Tionghoa memobilisasi sumber daya, mengadaptasi lembaga, dan menegosiasikan perannya dalam negara kolonial dan pascakolonial yang lebih besar. Penelitian ini berpendapat bahwa praktik filantropi ini bukan sekadar gerakan amal, tetapi merupakan bentuk agensi sosial dan ekspresi politik. Melalui lembaga mereka, orang Tionghoa di Semarang mengartikulasikan visi ketahanan komunitas yang melampaui partikularisme etnis dan penaklukan kolonial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang historis dan kondisi sosial-politik sebagai fondasi lahirnya lembaga-lembaga amal kemanusiaan oleh komunitas Tionghoa di Semarang pada periode 1920–1950; mengidentifikasi bentuk, fungsi, dan dinamika lembaga amal kemanusiaan oleh komunitas Tionghoa di Semarang selama periode 1920–1950; serta menganalisis proses adaptasi dan transformasi lembaga-lembaga tersebut dalam merespons tekanan sosial, ekonomi, dan politik sepanjang periode tersebut.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan. Pertama, penelitian ini berfokus secara khusus pada organisasi filantropi Tionghoa di Semarang, subjek yang kurang mendapat perhatian

khusus dalam sejarah sosial kota yang ada. Kedua, penelitian ini mengadopsi pendekatan holistik dengan meneliti berbagai jenis lembaga yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial sebagai komponen ekosistem filantropi yang kohesif. Ketiga, penelitian ini mencakup spektrum temporal yang luas yang mencakup kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia, sehingga menjelaskan strategi adaptif yang diterapkan oleh masyarakat di berbagai rezim. Keempat, sintesis teori filantropi dan modal sosial yang memberikan kerangka interpretatif yang kuat untuk memahami motivasi dan strategi komunitas dalam membangun ketahanan sosial.

METODE

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah yang melibatkan serangkaian tahapan sistematis dan saling terkait, sehingga memastikan validitas hasil penelitian. Metode sejarah adalah suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah (Wasino, 2018:11). Penulis melakukan studi pustaka dan penelusuran arsip sebagai langkah awal dalam tahap heuristik, yaitu proses mengumpulkan berbagai sumber primer seperti arsip *Staatsblad* dan juga surat kabar sezaman yang diperoleh melalui pencarian daring situs jejaring arsip resmi yaitu delpher.nl, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Setelah data terkumpul, penulis melakukan kritik sumber untuk menilai keaslian dan keandalan informasi, baik dari segi isi maupun konteks. Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu menganalisis data dengan menghubungkannya pada kerangka teori filantropi dan modal sosial guna menjawab pertanyaan penelitian. Akhirnya, semua hasil analisis disusun dalam tahap historiografi, yakni penulisan narasi sejarah yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kolonial *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel* terhadap Solidaritas Internal dan Inisiatif Swadaya

Dalam perjalanannya, dinamika kehidupan masyarakat Tionghoa di Jawa mengalami berbagai permasalahan. Peristiwa Geger Pacinan tahun 1740 yang merupakan bentuk perlawanan orang Tionghoa bersama masyarakat Jawa terhadap kolonialisme Belanda, menjadi catatan penting bagi pemerintah Hindia Belanda. Guna mencegah terulangnya kejadian serupa, pada awal abad ke-19 pemerintah kolonial memberlakukan berbagai pembatasan terhadap warga etnis Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda secara tegas menetapkan sistem klasifikasi sosial yang membagi penduduk menjadi tiga golongan, yaitu: (1) Kelompok kulit putih (orang Eropa) yang memperoleh hak istimewa dan perlakuan yang baik, (2) Kelompok asing berkulit berwarna (Timur Asing) yang menempati posisi sosial di tingkat kedua, dan (3) Kelompok pribumi yang ditempatkan pada lapisan sosial paling bawah (Sukisman, 1975).

Pada tahun 1835 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Staatsblad* No.37 yang menetapkan kebijakan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*. Undang-undang ini secara tegas membagi ruang perkotaan menjadi distrik etnis, di mana kaum Tionghoa diwajibkan menempati suatu kawasan pemukiman yang dipagari dan dibatasi koordinat administratifnya. Pasal-pasal utama dalam peraturan tersebut yakni Pasal 1 hingga Pasal 4 yang mengatur kewajiban pendaftaran kepala keluarga Tionghoa di kantor Resident, pelarangan pembangunan rumah di luar kawasan yang ditetapkan, serta sanksi administratif denda, eksekusi paksa, hingga kurungan di gudang pelabuhan bagi pelanggar (*Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* No.37, 1835). Dalam praktiknya, kebijakan ini tidak hanya memisahkan etnis, tetapi juga menimbulkan pemadatan hunian yang ekstrem.

Kebijakan ini juga mengharuskan setiap individu Tionghoa yang hendak meninggalkan distrik mereka untuk memiliki izin bepergian atau *pas*. Berdasarkan Pasal 1, pemohon *pas* harus mengisi formulir di kantor polisi Eropa, melampirkan rekomendasi dari Kapitan Cina setempat, dan membayar biaya administrasi yang jumlahnya setara upah dua hari seorang buruh pelabuhan. *Pas* tersebut berlaku selama 24 jam dan apabila melewati batas waktu, pemegang *pas* dapat dikenakan

denda atau bahkan penahanan singkat sesuai Pasal 3 (*Staatsblad Van Nederlandsch-Indië No.37, 1835*). Kebijakan ini secara sistematis membatasi jangkauan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya komunitas Tionghoa.

Kombinasi antara *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* menciptakan segregasi spasial dan kontrol mobilitas yang saling menguatkan. Kawasan Pecinan di Semarang yang sebelumnya merupakan pusat interaksi dagang multi-etnis, berubah menjadi lingkup tertutup dengan tembok kayu, gerbang berjaga, dan pos pemeriksaan. Kondisi sanitasi yang minim—drainase tanpa penutup dan sumur utilitas terkontaminasi limbah rumah tangga menimbulkan rentetan wabah penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera yang berkali-kali mewarnai catatan medis kolonial (Amalia et al., 2016). Sebagai konsekuensi langsung, harapan hidup di dalam wijk lebih rendah dibandingkan kawasan perdagangan Eropa.

Dari sisi ekonomi, *passenstelsel* mereduksi kapasitas perdagangan tradisional kaum Tionghoa. Surat izin yang hanya berlaku satu hari memaksa pedagang hanya dapat memuat dan menurunkan barang dalam waktu sangat singkat. Akibatnya, pengajuan *pas* meningkat drastis, namun realisasinya sering terhambat birokrasi berjam-jam di kantor polisi Eropa. Bahkan warga yang terbiasa berdagang ke pasar pinggiran kota harus bergantung pada tengkulak atau perantara non-Tionghoa yang memiliki jaringan izin lebih lancar. Respon diskriminatif aparat kolonial seperti denda administratif hingga penyitaan barang dagangan saat melewati pos semakin melemahkan posisi ekonomi mereka (Wijayati, 2016).

Secara sosiokultural, kebijakan ini menimbulkan terputusnya jejaring komunikasi dan interaksi sosial antara komunitas Tionghoa dengan jaringan lebih luas di dalam maupun luar kota. Dengan peralihan aktivitas keluar masuk dilakukan oleh agen resmi dengan *pas* khusus, komunikasi berita dan aliran modal lintas kepercayaan ikut terganggu. Hubungan kekerabatan lintas distrik Pecinan yang sering kali disatukan oleh klinteng dan klan tertentu menjadi terfragmentasi. Ketidakpastian waktu penerbitan *pas* juga menciptakan budaya waspada, warga enggan merencanakan perjalanan penting seperti ritual leluhur atau perayaan Imlek secara kolektif karena takut gagal memperoleh izin (Melati et al., 2014).

Sementara itu, kebijakan izin menyuburkan praktik patronase internal. Mereka yang memiliki akses lebih mudah biasanya merupakan seorang saudagar kaya atau pejabat Kapitan Cina yang berperan sebagai sponsor bagi pemohon *pas*. Praktik ini melahirkan ketergantungan yang mana bagi kaum lemah ekonomi harus membayar premi tambahan atau memberi imbal jasa kepada patron demi menjamin akses mobilitas. Dampaknya, strata sosial internal komunitas Tionghoa semakin jelas yaitu elit ekonomi mendominasi ruang gerak, sementara pedagang kecil dan pekerja kerah biru terpinggirkan (Wijayati, 2016).

Aspek penting lainnya adalah dampak psikologis dan kultural dari kebijakan ini. Pengalaman hidup dalam keterbatasan gerak, pengawasan ketat, serta peminggiran sosial menciptakan memori kolektif yang membentuk identitas kultural tersendiri bagi komunitas Tionghoa. Mereka mengembangkan narasi sejarah lokal sebagai bentuk resistensi kultural terhadap stigmatisasi dan marginalisasi. Literatur Tionghoa peranakan, seperti catatan harian dan terbitan komunitas, sering memuat keluhan akan sempitnya ruang hidup dan ketidakadilan izin bepergian, tetapi juga menampilkan narasi perlawanan diam-diam melalui solidaritas keluarga, klan, dan jaringan usaha kecil.

Perlu digarisbawahi bahwa pada tahun 1910, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Staatsblad* No. 536 dan 537 yang secara resmi menghapuskan kebijakan *passenstelsel* dan *wijkenstelsel*. Meskipun demikian, dampak sosial dan psikologis dari kebijakan tersebut tidak serta-merta hilang. Pola segregasi yang telah terbentuk selama lebih dari satu setengah abad tetap membekas dalam struktur sosial dan geografis kota-kota besar seperti Semarang. Bahkan setelah penghapusan formal, banyak komunitas Tionghoa tetap tinggal di kawasan Pecinan dan mempertahankan bentuk organisasi sosial yang telah berkembang selama masa pembatasan kolonial.

Dengan kata lain bahwa warisan dari kebijakan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* tidak hanya terlihat dalam segregasi spasial dan diskriminasi administratif, tetapi juga dalam lahirnya sistem ketahanan sosial berbasis komunitas yang kuat. Salah satu contoh awal dari inisiatif ini adalah pendirian Boen Hian Tong yang didirikan oleh Mayor Tan Tjong Hoay, Letnan Tan Ing Tjong dan beberapa orang Tionghoa lainnya yang memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan dana, logistik, serta layanan pemakaman bagi warga miskin yang tidak mampu mengurus proses kematian keluarganya (*De Locomotief*, 5 Juli 1900). Perkumpulan ini merupakan representasi awal dari lembaga filantropi formal berbasis nilai-nilai Konfusianisme, khususnya Ren (cinta kasih), Yi (keadilan), dan Li (norma sosial).

Pada awal didirikannya yaitu tanggal 7 Februari 1876 (*De Locomotief*, 7 April 1936), perkumpulan Tionghoa "Boen Hian Tong" memiliki tujuan untuk meningkatkan interaksi sosial, saling pengertian, dan saling membantu. Para anggotanya berkewajiban untuk membantu memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum dan berpartisipasi dalam upacara pernikahan anak-anaknya. Jika ada anggota yang tidak mampu, biaya upacara pemakaman dan pernikahan akan dibiayai oleh perkumpulan. Setiap penduduk laki-laki di Hindia Belanda, asalkan mereka keturunan Tionghoa, berusia tidak lebih muda dari 24 tahun dan tidak lebih tua dari 60 tahun, dapat menjadi anggota asosiasi. Biaya masuknya 50 gulden, kontribusi bulanan 2 gulden (*De Locomotief*, 17 Feb 1876).

Perkumpulan Tionghoa ini menjadi fondasi awal dari praktik filantropi komunitas Tionghoa yang kemudian berkembang lebih kompleks dalam bentuk sekolah, klinik, dan panti asuhan pada paruh pertama abad ke-20. Dengan demikian Boen Hian Tong tidak hanya menunjukkan kemampuan bertahan komunitas dalam tekanan, tetapi juga menjadi cikal bakal dari jaringan filantropi Tionghoa di Semarang. Keterpaksaan untuk mandiri dalam menghadapi ketidakadilan struktural menjadi katalis utama terbentuknya berbagai organisasi sosial, amal, dan filantropi di lingkungan Tionghoa. Solidaritas yang tumbuh dari kondisi keterbatasan ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan lembaga-lembaga kemanusiaan yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

Komunitas Tionghoa di Semarang dengan modal sosial yang kuat dan nilai-nilai etika yang mengakar, berhasil mengubah tekanan struktural menjadi peluang untuk membangun jaringan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, kebijakan kolonial yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengekang dan memisahkan, justru menjadi pemicu tumbuhnya kekuatan kolektif yang bertahan hingga masa pascakolonial.

Terbentuknya Berbagai Lembaga Amal Kemanusiaan Oleh Komunitas Tionghoa

Kondisi represif akibat kebijakan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak abad ke-18 tidak hanya menciptakan isolasi spasial bagi komunitas Tionghoa, tetapi juga mendorong mereka untuk membentuk sistem swadaya yang kuat sebagai respons atas keterbatasan akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, muncul berbagai lembaga amal kemanusiaan yang didirikan atau didukung oleh komunitas Tionghoa di Semarang. Lembaga-lembaga ini bukan hanya sebagai bentuk solidaritas etnis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat ketahanan komunitas terhadap eksklusi sosial dan ekonomi.

Dalam bidang pendidikan, muncul lembaga pendidikan yang disponsori oleh komunitas Tionghoa sebagai respons terhadap kebijakan kolonial yang membatasi akses anak-anak Tionghoa terhadap sekolah-sekolah negeri Belanda. Salah satu contoh penting adalah pendirian sekolah-sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang menjamur sejak akhir abad ke-19. Didirikan pada tahun 1900 di Batavia, THHK segera membuka cabang di berbagai wilayah Hindia Belanda, termasuk di Semarang yang berlokasi di Gang Tengah pada tanggal 15 Maret 1916 (*Bataviaasch nieuwsblad*, 15 Maret 1916). Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan Tionghoa perantaraan, memajukan nasionalisme Tionghoa berdasarkan Konfusianisme, dan menyatukan komunitas yang masih

terpecah secara provinsialistik. THHK adalah pelopor pendidikan Tionghoa modern di Hindia Belanda, mendirikan sekolah dasar (Tong Hwa Hak Tong) dan kemudian sekolah lanjutan (Hoa Ing Tiong Hak) untuk memberikan pendidikan berkualitas yang tidak disediakan oleh pemerintah kolonial. Lebih dari sekadar pendidikan, salah satu dari "Lima Sumbangsih THHK" secara eksplisit adalah "Menyelenggarakan kegiatan sosial; mengasahi dan membantu fakir miskin". Mereka juga aktif mengumpulkan bantuan materiil dan mengadakan acara amal untuk mendukung berbagai kegiatan mereka (Lan, 1940: 21-27).

Kemunculan organisasi formal seperti Boen Hian Tong sebagai fondasi awal dan THHK menandai pergeseran penting dari dukungan komunal informal ke filantropi yang terstruktur dan terlembaga. Formalisasi ini merupakan respons langsung terhadap tekanan dan batasan yang meningkat yang diberlakukan oleh kebijakan kolonial, yang sebagian besar mengabaikan kesejahteraan komunitas Tionghoa. Fokus utama THHK pada pendidikan merupakan investasi filantropi strategis dalam modal manusia. Dengan menyediakan pendidikan modern dan mempromosikan nilai-nilai Konfusianisme, komunitas memberdayakan generasi mendatang untuk menavigasi sistem kolonial, bersaing secara ekonomi, dan melestarikan identitas budaya mereka. Ini melampaui bantuan langsung ke pembangunan komunitas jangka panjang dan kemandirian. Penyebutan eksplisit tentang "membantu orang miskin" oleh THHK dan "layanan/dana kematian" oleh Boen Hian Tong menunjukkan pendekatan yang beragam terhadap kesejahteraan, menangani kebutuhan segera (saling membantu) dan pemberdayaan jangka panjang (pendidikan). Di Semarang, sekolah THHK menjadi wadah pendidikan alternatif yang mengajarkan bahasa Mandarin, pengetahuan umum, serta etika Konfusianisme kepada anak-anak Tionghoa (Lan, 1940: 92-100). Lembaga ini juga didukung oleh saudagar dan tokoh komunitas setempat melalui sumbangan rutin, yang menunjukkan adanya jaringan finansial internal yang kuat dalam menopang pendidikan sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem eksklusif kolonial.

Dalam bidang kesehatan, komunitas Tionghoa di Semarang membentuk klinik yang semula bersifat informal kemudian berkembang menjadi institusi medis permanen yaitu Poliklinik Tionghoa yang menjadi cikal bakal Rumah Sakit Telogorejo saat ini. Poliklinik Tionghoa didirikan pada tanggal 29 November 1925 di Gang Gambiran dengan Dr. Cheriex bertugas mengadakan konsultasi pada jam pagi dan Dr. Ngamdani memberikan bantuan pada jam malam. Adapun susunan kepengurusan sebagai berikut: Goei Ing Toen sebagai anggota kehormatan, Tjioe Siong Toen sebagai ketua, Sih Tiau Sik sebagai bendahara, Lie Kim Tjing, So Lian Hien, Pang Khoen Liem, Go Yok Ho, Tio A Hien, Tio Ping Kiat, Liem Bwan Tik, Kwa Tjan Sioe sebagai dewan komisaris, dan Oei Boen Goan sebagai direktur (*Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië*; 30 Nov 1925). Pendirian fasilitas ini didorong oleh kebutuhan akut akan layanan medis yang terjangkau di tengah kondisi sanitasi buruk di wilayah Pecinan dan minimnya perhatian pemerintah kolonial terhadap kesehatan masyarakat non-Eropa. Fasilitas kesehatan ini tidak hanya melayani komunitas Tionghoa, tetapi juga terbuka bagi kelompok masyarakat lain yang tinggal di sekitar kawasan Pecinan. Peran ini menunjukkan bahwa inisiatif swadaya komunitas tidak hanya eksklusif, tetapi juga inklusif dalam skala lokal.

Sektor lain yang mendapat perhatian dalam praktik amal komunitas Tionghoa adalah perlindungan terhadap anak-anak yatim dan kaum perempuan miskin. St. Mary's Hall merupakan sebuah lembaga pendidikan perempuan yang berdiri di jantung kamp Tionghoa Semarang tepatnya di Gang Waroeng petak 31, sebagai inisiatif lintas komunitas yang melibatkan masyarakat Belanda, Makassar, dan Tionghoa lokal, dengan tujuan utama memberikan pelatihan kerajinan tangan dan keterampilan rumah tangga bagi gadis-gadis Tionghoa kurang mampu. Diresmikan pada 7 Desember 1930 melalui upacara pemberkatan oleh Pendeta S.A. Beekman dan Pendeta J.I. van Beekhoven, lembaga ini secara eksplisit menyasar peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pendidikan praktis agar mereka kelak menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, sekaligus membuka akses pendidikan secara inklusif tanpa memandang agama, dengan biaya rendah. Bangunannya terdiri dari dua lantai, dengan lantai dasar berfungsi sebagai ruang penerima tamu

yang dihias indah dan altar bergaya Tionghoa yang telah diselaraskan dengan ikonografi Katolik, sementara lantai atas difungsikan sebagai ruang belajar di mana murid-murid merenda, menyulam, dan menenun. Sekolah ini dipimpin oleh Ibu Barbier dan didukung oleh Ibu Goei Ing Hong sebagai anggota dewan, serta mendapat perhatian dari tokoh-tokoh Tionghoa seperti Dr. Ong dari Ambarawa (*De Locomotief*, 8 Des 1930). Panti ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan makanan, tetapi juga mendidik anak-anak tersebut agar memiliki keterampilan dasar untuk bekerja atau berdagang di masa depan. Pembentukan panti ini mencerminkan kepekaan sosial komunitas terhadap isu kerentanan anak dan perempuan yang sering kali diabaikan oleh struktur sosial kolonial.

Faktor pendorong utama dari munculnya berbagai bentuk lembaga amal kemanusiaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi historis akibat segregasi dan pengucilan sosial yang diciptakan oleh kebijakan kolonial. Dalam ruang sosial yang dibatasi oleh pagar administratif dan mobilitas yang dikontrol secara ketat, komunitas Tionghoa membentuk sistem ketahanan kolektif melalui institusi-institusi yang mampu menjawab kebutuhan internal komunitas. Model kelembagaan ini berkembang secara mandiri, namun juga memiliki daya adaptif yang tinggi, termasuk dalam menjalin kerja sama lintas kelompok etnis, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berbagai lembaga amal kemanusiaan yang muncul di Semarang mencerminkan transformasi komunitas Tionghoa dari objek kebijakan diskriminatif menjadi subjek aktif dalam menentukan nasibnya sendiri. Mereka berhasil membangun jaringan solidaritas internal yang tidak hanya mampu mengatasi isolasi struktural, tetapi juga melahirkan budaya filantropi yang berbasis komunitas. Lembaga-lembaga ini menjadi penopang penting dalam dinamika sosial kota Semarang dan mewarnai lanskap kesejahteraan masyarakat di masa kolonial.

Adaptasi dan Transformasi Berbagai Lembaga Amal Kemanusiaan Dalam Menghadapi Tantangan Zaman

Lembaga amal kemanusiaan yang didirikan dan dikelola oleh komunitas Tionghoa di Semarang tidak hanya merupakan respons atas marginalisasi akibat kebijakan kolonial seperti *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*, tetapi juga mencerminkan adaptasi aktif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi antara tahun 1920 hingga 1950. Periode ini merupakan masa yang sangat dinamis, mencakup masa akhir kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks tersebut, lembaga-lembaga amal yang awalnya bersifat etnosentris dan eksklusif perlahan-lahan bertransformasi menjadi lebih terbuka, tanggap, dan strategis dalam menjalankan fungsinya.

Sebagai respons terhadap dinamika sosial dan tekanan urbanisasi di Semarang pada paruh pertama abad ke-20, Perkumpulan Pemakaman Tionghoa Boen Hian Tong menunjukkan kemampuan adaptasi dan transformasi kelembagaan yang signifikan dalam menghadapi tantangan zaman. Salah satu bentuk konkret dari adaptasi ini adalah inisiatif Boen Hian Tong untuk menggalang kerja sama antarperkumpulan pemakaman Tionghoa dalam upaya membuka lahan pemakaman baru guna menjawab kebutuhan komunitas yang semakin mendesak akan ruang pemakaman yang layak dan terjangkau. Melalui pembentukan sebuah komite khusus yang dipimpin langsung oleh Boen Hian Tong, organisasi ini mengambil peran sentral dalam memfasilitasi koordinasi antarperhimpunan, dengan kriteria keanggotaan terbatas pada asosiasi yang telah berbadan hukum atau berbentuk yayasan. Tercatat tujuh asosiasi telah bergabung dalam inisiatif kolektif ini, mencerminkan transformasi dari pendekatan berbasis etnis tertutup menjadi model kerja sama institusional yang lebih formal dan sistematis. Salah satu rencana utama komite adalah pembukaan lahan pemakaman baru di wilayah Karangbalong (Ngemplak), yang prosesnya sedang dinegosiasikan dengan pemilik tanah serta instansi pemerintah terkait (*De Locomotief*, 13 Maret 1953). Upaya ini menunjukkan bahwa Boen Hian Tong tidak hanya mempertahankan peran tradisionalnya sebagai penyelenggara layanan pemakaman, tetapi juga secara aktif merespons tekanan spasial dan administratif yang dihadapi komunitas Tionghoa di lingkungan perkotaan modern dengan cara yang terorganisasi dan berorientasi ke depan. Adaptasi ini sekaligus

mencerminkan transisi peran lembaga-lembaga komunitas Tionghoa dari sekadar pengelola kebutuhan ritus kematian menjadi aktor sosial yang mampu membentuk kebijakan lokal secara kolektif dan strategis.

Dalam bidang pendidikan, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), menunjukkan kemampuan adaptasi yang progresif terhadap dinamika sosial-politik dengan mulai memperbarui kurikulum mereka agar lebih relevan terhadap semangat zaman yang ditandai oleh berkembangnya nasionalisme, modernisasi, dan tuntutan integrasi sosial. Pada awalnya, institusi pendidikan ini lebih menekankan pengajaran bahasa Mandarin, sejarah Tiongkok, serta nilai-nilai etika Konfusianisme yang berorientasi pada pelestarian identitas etnokultural Tionghoa. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta adanya tekanan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda dan kemudian dari pemerintahan pendudukan Jepang yang mengedepankan asimilasi dan pembentukan identitas nasional, sekolah-sekolah ini mulai mengintegrasikan bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia ke dalam kurikulum mereka. Selain itu, mata pelajaran seperti pengetahuan umum, sejarah lokal, serta pendidikan kewarganegaraan mulai diajarkan guna menumbuhkan rasa kebangsaan di kalangan siswa keturunan Tionghoa. Adaptasi ini bukan hanya sekadar respons terhadap tekanan eksternal, melainkan juga merupakan bentuk kesadaran internal komunitas akan pentingnya mencetak generasi muda Tionghoa yang tidak hanya berakar pada warisan budaya leluhur, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat yang lebih luas dan majemuk. Langkah ini pada akhirnya memperkuat posisi sekolah-sekolah Tionghoa sebagai agen sosial yang tidak hanya melestarikan identitas, tetapi juga membentuk jembatan kultural antara komunitas Tionghoa dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Endriana, 2015).

Dalam sektor kesehatan, Poliklinik Tionghoa yang berdiri sejak 1925 dengan dukungan tokoh-tokoh Tionghoa terkemuka seperti Nyonya Oei Ing Hong dan Oei Tjong Hauw, awalnya berfungsi sebagai klinik rawat jalan yang memberikan layanan medis murah bahkan gratis bagi kaum miskin tanpa membedakan ras dan agama. Namun, memasuki tahun 1930-an dan 1940-an, klinik menghadapi tantangan besar, seperti krisis keuangan, penurunan jumlah donasi, serta kekurangan tenaga medis akibat pengunduran diri para dokter karena sakit atau kesibukan praktik pribadi. Situasi ini memuncak ketika satu-satunya dokter yang tersisa, Dr. Li Tjwan Sien, menghentikan kegiatannya pada bulan Februari 1940 dan rapat umum yang semestinya membahas perbaikan manajemen bahkan gagal terlaksana karena tidak adanya kehadiran anggota (*De Locomotief*, 24 Feb 1940).

Dalam konteks pascaperang, kebutuhan layanan kesehatan meningkat tajam karena rumah sakit di Semarang kelebihan beban dan tidak adanya rumah sakit militer. Pada akhir 1946, atas dorongan Dr. Eykman dari DVG, komunitas Tionghoa berinisiatif mendirikan rumah sakit darurat "Chung Cheng I Yuan" di Pendrikan. Rumah sakit ini dilengkapi bangsal bersalin dan perawatan penyakit dalam, mampu menampung hingga 70 pasien, dan mulai merawat pasien dari berbagai etnis dan latar belakang sosial. Inilah bentuk transformasi dari layanan rawat jalan sederhana menjadi fasilitas rawat inap darurat demi menjawab krisis layanan kesehatan masyarakat.

Proyek ini kemudian berkembang menjadi rencana pembangunan rumah sakit permanen, yang kelak dikenal sebagai Rumah Sakit Telogorejo. Proses ini melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, mulai dari sumbangan dana, pemberian tanah oleh keluarga Oei Tiong Ham, hingga keterlibatan insinyur dan kontraktor yang bekerja hampir tanpa bayaran. Pembangunan dimulai dengan gedung utama dan satu-dua paviliun, dengan cita-cita menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pusat layanan medis modern bagi semua golongan. Transformasi Poliklinik Tionghoa menjadi Chung Cheng I Yuan dan akhirnya menjadi Rumah Sakit Telogorejo mencerminkan kemampuan adaptasi komunitas Tionghoa dalam merespons krisis dan kebutuhan zaman melalui solidaritas sosial dan inovasi kelembagaan (*De Locomotief*, 30 Sep 1949).

Lebih lanjut lagi lembaga-lembaga sosial seperti yayasan St. Mary's Hall juga mengalami pergeseran fungsi dan orientasi. St. Mary's Hall yang pada awalnya didirikan sebagai sekolah kerajinan tangan untuk gadis-gadis Tionghoa kurang mampu di Gang Waroeng, mengalami

transformasi signifikan seiring berkembangnya kebutuhan komunitas. Pada akhir tahun 1936, lembaga ini mengambil langkah penting dengan membeli bangunan baru bernama "Kebon Dalem", yang kemudian dialihfungsikan menjadi panti asuhan. Setelah melalui proses renovasi besar yang memakan biaya cukup tinggi, pada 2 Februari 1937, sebanyak 53 anak resmi dipindahkan dari lokasi lama ke gedung baru Kebon Dalem. Perubahan ini menandai pergeseran fungsi lembaga dari sekadar tempat pelatihan keterampilan menjadi pusat perawatan anak-anak terlantar. Untuk membantu menutup biaya renovasi, diselenggarakan pasar mewah pada bulan Juni yang berhasil menarik 8.000 pengunjung dan menghasilkan keuntungan hampir f 3.000. Jumlah anak yang dirawat pun meningkat signifikan; pada akhir tahun tercatat 81 anak (62 laki-laki dan 19 perempuan), dengan 27 di antaranya diterima secara cuma-cuma. Meskipun operasional tahun itu ditutup dengan defisit sebesar f 230,32, berkat sumbangan berupa beras dan gula dari para dermawan serta keterlibatan tokoh-tokoh penting seperti Dr. Ong Kie Hong sebagai penanggung jawab kesehatan, panti asuhan Kebon Dalem tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga amal yang vital bagi anak-anak Tionghoa miskin di Semarang (*De Locomotief*, 16 Maret 1938).

PENUTUP

Lembaga-lembaga amal kemanusiaan yang dibentuk oleh komunitas Tionghoa di Semarang memiliki akar yang panjang, dimulai sejak akhir abad ke-19 dengan berdirinya Boen Hian Tong yang didasari oleh nilai-nilai Konfusianisme sebagai respons awal terhadap keterbatasan akses layanan sosial akibat kebijakan kolonial. Lembaga ini menjadi tonggak awal filantropi komunitas Tionghoa yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas internal dan menjamin kesejahteraan dasar anggota komunitas. Dalam perjalanannya, praktik filantropi ini berkembang pesat pada periode 1920–1950 melalui pendirian lembaga-lembaga baru di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial seperti THHK, Poliklinik Tionghoa, dan St. Mary's Hall. Setiap lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi sosialnya secara konsisten, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan bertransformasi secara signifikan dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi masa kolonial akhir, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië. (1925, November 30). Poliklinik Tionghoa.
- Amalia, R., Purnomo, A., & Shokheh, M. (2016). Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente Semarang Tahun 1906-1942. *Journal of Indonesian History*, 5(1).
- Bataviaasch nieuwsblad. (1916, Maret 15). Engelsch-Chineesche school.
- De Locomotief. (1876, Februari 17). Vervolg der Nieuwstijdingen.
- De Locomotief. (1900, Juli 5). Boen Hian Tong.
- De Locomotief. (1930, Desember 8). St. Mary's Hall. Een plechtigheid in de Chineesche kamp.
- De Locomotief. (1936, April 7). CHIN. BEGRAFENISFONDS. Ledenvergadering met nachtfnif.
- De Locomotief. (1940, Februari 24). DE POLIKLINIEK TIONGHOA-CRISIS
- De Locomotief. (1949, September 30). REEDS BEGONNEN TE BOUWEN
- De Locomotief. (1953, Maret 13). 'n Nieuwe Chinese begraafplaats
- Endriana, C. (2015). Sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan (THHK) Di Mojokerto Pada Tahun 1907-1942. *Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(3).
- Hartati, D. (2012). Konfusianisme dalam kebudayaan Cina modern. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 2(2), 174-179.
- Kasmadi M., Hartono & M.A, Wiyono. (1985). *Sejarah sosial kota Semarang 1900-1950*. Direktorat Jendral Kebudayaan, Jakarta.
- Lan, Nio Joe. (1940). *Riwayat 40 Taon Dari Tiong Hoa Hwee Koan Batavia (1900-1939)*
- Melati, M. L., Nataya, A. K., & Wibowo, A. A. (2014). Perkembangan Kawasan Pecinan Semarang. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 10(6), 361-374.

- Staatsblad Van Nederlandsch-Indië No.37. (1835). Vereeniging Der Op Java Aanwezige Vreemde Oosterlingen In Afzonderlijke Wijken.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indië No.536. (1910). Opheffing Van De Voor Java En Madoera Bestaande Beperkende Bepalingen Betreffende Het Reizen Van Inlanders En Met Dezen Gelijkgestelden.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indië No.537. (1910). Nieuwe Regeling Van Het Wijken Stelsel Voor Vreemde Oosterlingen Op Java En Madoera.
- Sukisman, W.D. (1975). Masalah Cina di Indonesia. Jakarta: Yayasan Penelitian Masalah Asia.
- Thian Joe, Liem. (2004). Riwayat Semarang. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Utama, N. J., & Lusianto, J. F. (2019). Jejak Historis Dan Peranan Sungai di Kota Semarang Pada Awal Abad 20. *Journal of Indonesian History*, 8(2), 135-145.
- Wasino, M., & Endah Sri, H. (2018). Metode penelitian sejarah: dari riset hingga penulisan.
- Wijayati, P. A. (2016). Relasi Pasar, Negara, dan Masyarakat: Kajian Pada Ruang Perkotaan Semarang Awal Abad Ke-20. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2), 186-202.
- Zakariya, A. A. (2023). Etnis Tionghoa di Surabaya: Kepasan sebagai kawasan pecinan abad ke-19-20. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 14(1).